BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 33 UUD 1945, Indonesia menganut sistem ekonomi nasional yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan untuk menggapai cita-cita luhur yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama bangsa Indonesia dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga tercipta perekonomian nasional yang baik. Pelaku ekonomi yang diharapkan untuk mengelola sumber daya tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.

Pasca-reformasi, pengelolaan BUMN diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang: (1) penataan BUMN secara efisien, transparan, dan profesional; (2) penyehatan BUMN yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (3) mendorong BUMN yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum untuk melakukan privatisasi dipasar modal. Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan. (2) Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. (3) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan

prinsip pengelolaan perusahaan (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).

Berdasarkan master plan Kementrian BUMN tahun 2010-2014, maka visi Kementrian BUMN yaitu mewujudkan BUMN sebagai instrumen negara unttuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme korporasi, sedangkan misi BUMN yaitu :

1) Meningkatkan kualitas pengelolaan BUMN yang semakin transparan dan akuntabel
2) Meningkatkan peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara
3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum
4) Meningkatkan peran BUMN dalam usaha keperintisan
5) Meningkatkan peran BUMN dalam rangka pengembangan UMKM
6) Meningkatan peran BUMN untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional.

Secara formal pemerintah mulai ikut menangani panagn pada zaman penjajahan Belanda,ketika didirikannya *Voedings Middelen Fonds* (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan.

Dalam masa penjajahan Jepang, VMF dibekukan dengan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Didaerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) – Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah – daerah yang diduduki Belanda, VMF di bubarkan dan di bentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang di bentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksanaan Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP. Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain :

- Mengurus bahan pangan
- Mengurus pengangkutan dan pengolahannya
- Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari DBM

Dengan terbentuknya BPUP, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan.

Memasuki Era Orde Baru setelah di tumpasnya pemberontak G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 mei 1967, lembaga tersebut di bubarkan dan di bentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Perusahan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengrusi tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.

Fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, bulog menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persedian, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bulog
3. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakn fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
    1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang manajemen logistik, pengadaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras
    2. Perumusan norma dan pengadaan, pengolahan dan distribusi beras

Perum Bulog, sebagai salah satu perusahaan BUMN memegang peranan penting dalam mengelola stabilitas ketahanan komoditas pangan strategis di indonesia, khususnya komoditas beras.

Komoditas pangan strategis adalah berbagai jenis komoditas atau produk yang dibutuhkan seluruh kalangan masyarakat di Indonesia yang dianggap penting oleh Pemerintah Indonesia, seperti : beras, Tepung, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Daging Sapi. Sehingga stabilitas keberadaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Peningkatan Produktividas diperkirakan menjadi mesin pertumbuhan , sehingga produksi beras dunia dapat meningkat 9% hingga tahun 2018. Diantara Negara-negara berkembang , diperkirakan adanya penyusutan penanaman padi dan kedelai, terkait dengan kebijakan yang berlaku, penurunan dukungan atau kondisi pendorong pertumbuhan tanaman yang kurang baik. Tetapi dilain pihak berdampak pada meningkatnya areal tanam komoditas jagung. Walaupun demikian, penurunan diperkirakan tidak serendah dekade sebelumnya. Digunakannya padi hibrida dan galur modifikasi genetik yang mampu meningkatkan produksi padi kemungkinan juga dapat dihambat oleh faktor lain,

seperti penurunan kesuburan lahan, kompetisi lahan, air dan tingkat tenaga kerja, sehingga perebutan pengadaan beras dari pasar global masih tetap akan ketat.

Pangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi karena itu, pangan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Apabila ketersediaan pangan suatu bangsa tidak mencukupi dibandingkan kebutuhannya maka dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi bangsa tersebut, selain itu berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Di Indonesia pangan diidentikkan dengan beras, karena beras merupakan makanan utama bangsa Indonesia pada umumnya. Penduduk Indonesia merupakan pengonsumsi beras terbesar di dunia, yaitu 139 kg/kapita/thn, Malaysia 70 kg/kapita/thn, sedangkan Jepang hanya 60kg/kapita/thn. Maka Indonesia merasa perlu untuk membangun undang-undang yang melindungi hak rakyat atas ketersediaan pangan, dan tahun 1996 terbit undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Amanat dan regulasi tersebut, pada pasal 45 menegaskan, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan pasal 47, ditegaskan, guna mewujudkan cadangan pangan nasional , pemerintah berupaya : (a) mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, (b) mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional.

Namun realitas yang dialami ternyata pemerintah masih belum mampu memenuhi amanah undang-undang tersebut, larena masih tidak amannya ketersediaan pangan, sehingga setiap tahun selalu mengalami kekurangan stok nasional mengakibatkan harus impor. Jenis pangan pokok masih seragam karena masyarakat dibuat rice minded, karena di satu wilayah surplus di tempat lain minus, dan akibatnya harga pangan menjadi mahal, karena terdistorsinya sistem distribusi.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga ketersediaan beras sepanjang tahun, dengan mendistribusikan beras secara merata dan menjaga harga beras agar tetap stabil serta meningkatkan produksi dalam negeri (swasembada pangan). Upaya pemerintah tersebut menjadi semakin kompleks mengingat pertambahan penduduk Indonesia yang semakin besar dan tersebar di berbagai geografis serta memiliki keadaan ekonomi yang bervariasi.

Beras merupakan salah satu komoditas yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap inflasi, baik nasional maupun regional. Di antara ratusan komoditas yang termasuk dalam daftar Indeks Harga konsumen (IHK), bahan pangan pokok masyarakat Indonesia ini memiliki bobot yang cukup besar dalam perhitungan inflasi. Bobot inflasi beras dalam perhitungan inflasi Jawa Barat (gabungan tujuh kota) mencapai 4,92%, kedua terbesar setelah bobot inflasi kontrak rumah yang mencapai 8,06%.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati penyerapan lima tahun terakhir Beras Sub Divisi Regional Jabar, dimana persediaan tiap tahun berjumlah, pada tahun 2011 persediaan yang dikuasai sejumlah 583.282.557.20 Kg, tahun 2012 sejumlah 820.825.179.45 Kg, tahun 2013 sejumlah 819.352.239.45 Kg, tahun 2014 sejumlah 714.303.772,15/Kg, dan tahun 2015 sejumlah 816,807,491,76/Kg

Dilihat dari Persediaan Operasional Beras Sub Divisi Regional JABAR dari tahun ketahun, persediaan yang dikuasai dalam kondisi stabil,mulai dari tahun 2011 dengan jumlah 583,282,557,20 Kg, Artinya dalam kondisi tahun ini penyerapan atau pemasukan dari mitra kerja Bulog lebih sedikit hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya fakto cuaca seperti musim hujan atau kemarau panjang, untuk mencukupi kebuthannya, maka mengambil stok dari sub regional yang mempunyai stok berlebih, sedangakn untuk tahun 2012 dengan jumlah 820,825,179,45 Kg, artinya dalam tahun ini pemasukan beras dari mitra kerja bulog dalam kondisi ideal, karena stok mencukupi untuk 3 bulan kedepan pada tahun berikutnya, sehingga pada tahun 2013 pemasukan beras dari mitra kerja Bulog sudah ideal atau cukup, sedangkan untuk tahun 2014, pemasukan beras dari mitra kerja Bulog agak riskan atau aman, tetapi untuk penyediaan 3

bulan pertama pada tahun 2015 berkurang, sehingga kebutuhan Bulog pada tahun 2015 di tambah jumlahnya.

1.2 Perumusan Masalah

a. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap penerapan Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
b. Bagaimana Penerapan Manajemen Kualitas Total berpengaruh terhadap Manajemen Rantai pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
c. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
d. Bagaimana Pengaruh Manajemen Kualitas Total terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
e. Bagaimana Pengaruh Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
f. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Penerapan Manajemen Kualitas Total, secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
g. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Kualitas Total yang berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
h. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perusahaan, melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?
i. Bagaimana Pengaruh Manajemen Kualitas Total terhadap Kinerja Perusahaan, melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap penerapan Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
b. Untuk mengkaji tentang Penerapan Manajemen Kualitas Total berpengaruh terhadap Manajemen Rantai pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
c. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
d. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Manajemen Kualitas Total terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
e. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Manajemen Rantai Pasok terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
f. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Penerapan Manajemen Kualitas Total, secara simultan berpengaruh terhadap Penerapan Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
g. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Manajemen Kualitas Total yang berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
h. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perusahaan, melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat
i. Untuk mengkaji tentang Pengaruh Manajemen Kualitas Total terhadap Kinerja Perusahaan, melalui Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan Umum Bulog Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya Manajemen Kualitas Total, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Rantai Pasok.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan yang bermakna bagi semua pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan supply chain management dari hulu sampai ke hilir, seperti : Supplier, produsen, Distributor/Retailer dan Customer dalam bidang komoditas pangan strategis beras, gula pasir, tepung terigu, kedelai, minyak goring dan daging sapi.

1.5 Pembatasan Masalah

Batasan-batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah masih rendahnya penerapan manajemen rantai pasok akibat belum terpenuhinya penerapan manajemen kualitas terpadu dan manajemen Kualitas Total, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa variabel saja yaitu :
   a. Variabel Manajemen rantai pasok : Kemitraan dengan pemasok, Hubungan pelanggan, dan Berbagi informasi;
   b. Variabel Manajemen kualitas total : Komitmen pimpinan, Fokus pelanggan dan Perbaikan berkelanjutan
   c. Variabel Kepeimpinan Transformasional : Pengaruh Ideal, Motivsi Inspirasional, Simulasi Intelektual, Perhatian Individu.

2. Lokasi perusahaan difokuskan pada pemasok beras untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan teori dasar yang digunakan dalam pengolahan data dan usulan dalam Tugas akhir.

BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH

Berisikan gambaran langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penelitian dan penyusunan tugas akhir.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan data-data yang telah diperoleh dari survei lapangan serta pengolahan data tersebut dan perhitungan yang selanjutnya akan digunakan untuk pemecahan masalah

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil dari perhitungan dan pengolahan data tersebut dan selanjutnya dilakukan pemecahan masalah dengan melakukan analisa terhadap hasil dari perhitungan dan pengolahan data.

BAB VI KESIMPULAN

Berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan pembahasan dari data tersebut.